

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### Gambar 1. 1 Kantor Pusat BP Batam Center

Badan Pengusahaan (BP) Batam lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 yang menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh tahun) sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut. Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru merupakan bagian dari KPBPBB Batam. Pertimbangan utama penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu karena letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat

I - 2

memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja. Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai. Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Seiring berjalannya waktu, saat ini BP Batam memiliki 5 unit usaha yaitu:

1. Badan Usaha Bandar Udara,

BP Batam mengelola satu satunya bandara di Kota Batam yaitu Bandar Udara Hang Nadim.

## 2. Badan Usaha Pelabuhan

BP Batam mengelola 6 pelabuhan barang yaitu Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Pelabuhan Kargo Sekupang, Pelabuhan Kargo Kabil Citranusa, Pelabuhan Kargo Kabil dan 4 pelabuhan penumpang yaitu Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Harbourbay, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Putra, Pelabuhan Teluk Senimba, Pelabuhan Telaga Punggur.

## 3. Badan Usaha Rumah Sakit

BP Batam mengelola rumah sakit yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang, Batam.

## 4. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan merupakan Unit Usaha yang mengelola dan melaksanakan kegiatan perusahaan di bidang Air dan Limbah, Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman.

## 5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Pengelolaan air minum di Batam di bawah tanggung jawab BP Batam dan dioperasikan oleh PT. Moya Indonesia.

I - 3

Adapun tugas dan fungsi BP Batam adalah:

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Fungsi:

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal.
6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang.
7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana pehubungan laut dan udara.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

## 1.2 Sejarah BP Batam

Perkembangan Batam tidak bisa dilepaskan dari peran serta Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto, terakhir diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar Berbintang Emas Lima, sejak awal, dirinya memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Walau prioritas pembangunan ekonomi itu bertitik berat pada bidang pertanian, Presiden Soeharto, juga tetap memberi perhatian pada bidang industri. Dalam perkembangannya kemudian, Presiden Soeharto menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Riau saat itu, bernama Batam. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Batam, kini telah menjadi sebuah “kota industri” yang mempunyai banyak daya tarik. Pada tahun 1960, Ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru yang sebelumnya berada di Tanjung Pinang, dan sejak saat itu pula, Tanjung Pinang resmi menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, yang meliputi 17 kecamatan, termasuk di antaranya Pulau Batam yang berada di lingkup Kecamatan Pulau Buluh. Pulau Batam berstatus sebagai satu desa dalam lingkup kecamatan Pulau Buluh, Belakang Padang pada tahun 1965. Pada saat itu, Pulau Batam hanyalah suatu tempat yang tidak diutamakan, dengan kondisi yang tidak lebih seperti pulau hinterland di Kepulauan Riau, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur seperti sekarang. Kini, Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1.3 juta jiwa, bahkan tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu hanyalah gugusan rawa-rawa belukar dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di pesisir pantai. Pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Badan Pengusahaan Batam atau yang lebih dikenal BP Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina pada masa kepeimpinan Ibnu Sutowo tahun 1970-an. Kemudian lahir Keputusan Presiden (Keppres)

Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penetapan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian diubah beberapa kali melalui Perpu, sehingga diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang, dan masih banyak

I - 5  
peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam. Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR RI tahun 2009, bersama dengan Pemerintah Pusat, dibahas mengenai Undang – Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai payung hukum pembentukan KEK di kawasan Batam dan daerah lainnya di Indonesia.

### 1.2.1 Logo Perusahaan

Gambar 1. 2 Logo BP Batam

Arti logo BP Batam:

- Burung Elang Emas

Mengartikan bahwa BP Batam mempunyai komitmen membangun Batam menjadi sebuah daerah maju yang berstandar internasional, seperti Burung Elang yang memiliki kemampuan terbang paling tinggi, BP Batam akan selalu jeli menyikapi perubahan seperti jelinya penglihatan mata Burung Elang.

- Warna Emas

Warna emas dari Burung Elang melambangkan komitmen BP Batam dalam memberikan yang terbaik bagi stakeholder dan masyarakat, baik pelayanan,

infrastruktur dan keterjaminan usaha seperti sifat emas yang merupakan instrumen investasi paling stabil.

I - 6

- Dasar Biru

Biru merupakan lambang kepercayaan, kebijaksanaan, dan kematangan berfikir. Sehingga logo ini bermakna bahwa kepercayaan stakeholder menjadi sebuah prioritas paling utama dan kematangan Batam dalam pengalamannya mampu memberikan yang terbaik.

- Bujur Sangkar

Bujur sangkar adalah poligon yang memiliki empat sisi, empat sudut tegak lurus dan dua buah sisi yang saling sejajar (paralel). Menandakan bahwa BP Batam akan memberikan kinerja prima kepada semua stakeholder dengan mengedepankan profesionalisme.

#### 1.2.2 Visi Misi BP Batam

Visi BP Batam:

Memberikan kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi BP Batam:

1. Mencari investasi asing dalam rangka mendukung struktur ekonomi yang produktif.
2. Memberi dukungan fasilitas bagi pengembangan investasi yang berorientasi ekspor dalam rangka menunjang struktur ekonomi yang produktif.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang investasi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang berkelanjutan.

6. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Kawasan  
Peerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

I - 7

### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Kantor Pusat BP Batam seperti gambar di bawah ini:

Pusat Pengembangan

KPBPBB dan KEK

Pengembangan

Usaha dan Kerjasama

Usaha

Fasilitas dan

Kemudahan

Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK)

Pengembangan

Usaha

Pengembangan Kerja

sama

Ketersediaan Sumber

Daya Strategis Kajian Daya Saing Kelembagaan Hubungan Kerja

Sama

Anggota Bidang

Administrasi dan

Keuangan

Anggota Bidang

Kebijakan Strategis

Anggota Bidang

Pengelolaan Kawasan

dan Investasi

Wakil Kepala BP

Batam

Kepala BP Batam  
Anggota Bidang  
Badan Pengusahaan  
Pusat Perencanaan  
Program Strategis  
Pusat Harmonisasi  
Kebijakan  
Satuan Pemeriksa  
Intern

### Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BP Batam

Penjelasan mengenai tugas dan fungsi pada masing – masing struktur organisasi:

#### 1.3.1 Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK

Fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan usaha dan kerja sama usaha.
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Kawasan ekonomi khusus.
- c. Penyiapan dan penyusunan koordinasi dan kebijakan di bidang rencana fasilitas dan kemudahan.

I - 8

#### 1.3.2 Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, skema kerja sama dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama usaha.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, kajian rencana asset, lahan, dan skema kerjasama.
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang kerja sama usaha.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha terdiri atas:

#### 1.3.2.1 Subbidang Pengembangan Usaha

Subbidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan portofolio usaha, bahan promosi peluang investasi, kajian rencana pengembangan asset dan lahan asset barang milik negara.

#### 1.3.2.2 Subbidang Kerjasama Usaha

Subbidang Kerjasama Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen skema kerja sama, pemilihan mitra dan perjanjian kerja sama serta evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama.

#### 1.3.3 Bidang Fasilitas dan Kemudahan

Bidang Fasilitas dan Kemudahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kajian daya saing dan pengembangan daya saing.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang insentif fiskal dan non fiskal dan pasokan bahan kebutuhan pokok.

I - 9

b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bidang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.

Bidang Fasilitas dan Kemudahan terdiri atas:

##### 1.3.3.1 Subbidang Kajian Daya Saing

Subbidang Kajian Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian rekomendasi mengenai kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, kuota keluar masuk barang industry dan konsumsi, manajemen rantai pasok industri.

##### 1.3.3.2 Subbidang Ketersediaan Sumber Daya Strategis

Subbidang Ketersediaan Sumber Daya Strategis mempunyai tugas melakukan oenyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian di bdiang ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan



ketahanan energi serta produktivitas tenaga kerja.

#### 1.3.4 Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Bidang Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kelembagaan, pengembangan dan hubungan Kerjasama Kawasan ekonomi khusus.

Fungsi:

- a. Penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan Kawasan ekonomi khusus.
- b. Penyiapan dan penyusunan pengembangan dan hubungan kerja sama kawasan ekonomi khusus.

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

##### 1.3.4.1 Subbidang Kelembagaan

Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rekomendasi transformasi kelembagaan Kawasan ekonomi khusus.

##### 1.3.4.2 Subbidang Pengembangan dan Hubungan Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus.

I - 10

##### Subbidang Pengembangan dan Hubungan Kerjasama KEK

mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kemudahan perizinan dan fasilitas perpajakan, sektor industri unggulan manufaktur dan jasa, bahan promosi dan perencanaan strategis peningkatan investasi serta perumusan program pengembangan vokasi dan usaha ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus.

#### 1.4 Lokasi

Adapun lokasi Kantor Pusat BP Batam berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Kode Pos 29400. Jika dilihat pada peta maka akan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1. 4 Peta Lokasi Kantor Pusat BP Batam